

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi dan Misi Bupati Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan implementasi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. RKPD disusun melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, mengacu kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana tertuang Surat Edaran Gubernur Nomor : 050.23/0220975 tentang Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2018. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang; serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan. RKPD Kabupaten Purbalingga memuat evaluasi pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA”**.

Makna yang termuat dalam Visi Kabupaten Purbalingga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam

pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

2. Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.
3. Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.
4. Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Sedangkan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang ingin dicapai adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam RPJMD 2016-2021, dapat dirumuskan sebagai berikut:

4.2.1 Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah: Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.2.2 Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah : Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
3. Menurunnya resiko bencana.

4.2.3 Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya pangan dan papan secara layak juga merupakan landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata. Pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar dalam upaya menurunkan kasus

kerawanan pangan dan gizi buruk serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah :

1. Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
2. Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

4.2.4 Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan sasaran :

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
5. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
6. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Meningkatnya budaya gemar membaca.
8. Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni.
9. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.

4.2.5 Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing pariwisata.
3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri.
4. Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.
5. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.
6. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian.
7. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.
8. Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.
9. Meningkatnya pelayanan transmigrasi.

4.2.6 Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang

memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah :

1. Mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, produktif dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah.
 - b. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai.
 - c. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.
 - d. Meningkatnya bangunan gedung laik fungsi.
 - e. Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan.
 - f. Meningkatnya akses air limbah domestik / rumah tangga.
 - g. Meningkatnya akses pelayanan persampahan.
 - h. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas jasa konstruksi.
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
3. Meningkatnya kualitas layanan angkutan orang dan barang, dengan sasaran meningkatnya manajemen, kapasitas dan kualitas angkutan.
4. Meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik.
5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa, dengan sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa.
6. Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, dengan sasaran Meningkatnya Kepastian Status dan Pemanfaatan Tanah.

4.2.7 Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan

sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 7 adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dengan sasaran Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju tahun 2019 Kabupaten Purbalingga

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2016 Eksisting	Target Kinerja Sasaran	
					2018	2019
I	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat					
1.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	Indeks	77,96	79	79,5
		Opini audit keuangan BPK	Opini	WDP	WTP	WTP
		Persentase kepemilikan KTP	Persen	93,61	94	94,5
		Persentase kepemilikan akte	Persen	81,63	84	85
II	Tujuan : Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat					
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	Persen	94,4	100	100
2.	Menurunnya indeks resiko bencana	Persentase korban bencana yang terlayani	Persen	100 (116 kejadian)	100	100
		Persentase bencana kebakaran yang terlayani	Persen	100 (34 kejadian)	100	100
3.	Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	-	70 (Pilgub)	70 (Pilpres)
III	Tujuan : Meningkatkan ketahanan pangan					
1.	Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82,5	88	89
		Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap/th	152,19	168	170

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2016 Eksisting	Target Kinerja Sasaran	
					2018	2019
IV	Tujuan : Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni					
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	Persen	88,58 (jumlah rumah 241.295; jumlah rumah layak : 231.758)	91,3	92,1
		Persentase kepemilikan rumah	Persen	80,15 (jumlah KK 301.358 ; jumlah rumah 241.295)	84,62	86,12
V	Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat					
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan lama sekolah	Angka	11,78	12,3	12,5
		Rata2 lama sekolah	Tahun	6,85	7,33	7,61
		APK SD/Sederajat	Angka	110,34	109	110
		APK SMP/Sederajat	Angka	100,36	100	100
		APM SD/Sederajat	Angka	92,36	91	91
		APM SMP/ Sederajat	Angka	69,69	70	70
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,81	73,1	73,2
		Angka Kematian Ibu	Per 100 ribu KH	104,6 (15 kasus)	74	61
		Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	8,99 (129 kasus)	7	6
		Prevalensi balita gizi buruk	Persen	0,10 (15 kasus)	0,95	0,9

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2016 Eksisting	Target Kinerja Sasaran	
					2018	2019
3.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,03	< 1	< 1
		Persentase peserta KB aktif	Persen	87,72 (jumlah PUS 196.908, peserta KB 172.731)	90	92
		Persentase PUS tak terlayani	Persen	12,28 (tak terlayani 24.177)	11,05	10,5
4.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	76,05	77	79
5.	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Persentase PMKS yang terlayani	Persen	16,27	50	60
6.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Angka	90,13	90,5	91
		Persentase kekerasan anak yg tertangani	Persen	100	100	100
7.	Meningkatnya budaya gemar membaca	Persentase desa memiliki perpustakaan	Persen	28 (68 desa)	43	50
8.	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian benda cagar budaya serta prestasi seni	Jumlah gedung/ tempat gelar seni	Unit	11	11	11
		Intensitas pementasan seni budaya daerah	Kali	92	95	102
9.	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah prestasi Olahraga Tingkat regional dan Nasional	Orang	18	20	23

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2016 Eksisting	Target Kinerja Sasaran	
					2018	2019
VI	Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat					
1.	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Pertambahan nilai investasi baru	Juta rupiah	480.000	520.000	570.000
		Lama waktu perijinan investasi	Hari	5,6	5	4,8
2.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	1.689.179	2.529.000	2.779.000
3.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industry	Nilai PDRB Sektor Industri	triliun rupiah	3,6	4,7	5,0
4.	Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial	Tingkat Pengang-guran Terbuka	Persen	4,84	4,56	4,13
		Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK	Persen	89,85	90	92
5.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)	Persentase koperasi sehat	Unit	60	68	70
		Jumlah usaha mikro bersertifikat / ijin	Unit	222	293	313
6.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing SektorPertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Triliun rupiah	5,09	5,9	6,2
		Produksi padi	Ton	226.707	257.258	259.830
		Produksi jagung	Ton	43,095	43.531	43.936
		Produksi kedele	Ton	134	150	155
		Produksi daging	Ton	9,856	14.781	14.929
7.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Miliar rupiah	105	320	333
		Produksi Ikan Konsumsi	Ton	5.001	5.164	5.262

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2016 Eksisting	Target Kinerja Sasaran	
					2018	2019
8.	Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau	Pasar yang memenuhi standar SNI	Unit	0	2	3
9	Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi	Persentase calon transmigran dilatih	Persen	100	100	100
VII	Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan					
1.	Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah	Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	77,56 (608.251 km)	78,32	79,60
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	96,70 (264 jembatan)	97,3	97,9
		Persentase lajur jalan minimal 5,5 M	Persen	11,45 (89.798 km)	15,94	19,13
		Persentase drainase perkotaan	Persen	20,54 (27.002 m)	23,75	24,19
2.	Meningkatnya keterse-diaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang memadai	Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik	Persen	40,98 (170.995 m)	43,8	45,2
		Ketersediaan air baku irigasi	Persen	87,09 (20.478 m3)	89,5	90
3.	Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga mengakses air bersih	Persen	82,78	94,25	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2016 Eksisting	Target Kinerja Sasaran	
					2018	2019
4.	Meningkatnya akses air limbah domestik / RT	Persentase rumah Tangga terlayani sistem air limbah	Persen	78,58	92,5	100
5.	Meningkatnya akses pelayanan persampahan	Rasio timbulan sampah terlayani	Persen	60	62	65
6.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yg efektif	Persentase ruang terbuka hijau publik	Persen	18,1	18,51	18,71
VIII	Tujuan : Meningkatkan kualitas kawasan permukiman					
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Luasan kawasan kumuh perkotaan	Persen	23,70	16,2	10,8
IX	Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan angkutan orang dan barang					
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas angkutan serta fasilitas perlengkapan jalan	Angka kecelakaan lalu lintas (per hari dalam satu tahun)	Angka	0,74 (270 perkara lalu lintas)	0,71	0,68
X	Tujuan : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik					
1.	Meningkatnya implementasi <i>e government</i> dan keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	Persen	63,96 (31 website, 37 SIM)	65	67
XI	Tujuan : Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa					
1.	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa	Persentase desa dengan BUM Desa sehat	Persen	78 (161 BUMDes, 15 BUMDes)	80	84

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2016 Eksisting	Target Kinerja Sasaran	
					2018	2019
				bersama)		
XII	Tujuan : Terwujudnya tertib pertanahan dan pemanfaatan tanah					
1.	Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah pemerintah daerah bersertifikat	Persen	62,66	80	90
XIII	Tujuan : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati					
1.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,5	64,5	65,5

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

4.3.1. Prioritas Pembangunan

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Purbalingga tahun 2018 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Purbalingga juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten.

Pembangunan Kabupaten Purbalingga menyelaraskan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain menyelaraskan pembangunan nasional Kabupaten Purbalingga juga menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan.
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan

pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin.

3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan.
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran.
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

4.3.2. Prioritas Kabupaten Purbalingga

Prioritas dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan, melalui:
 - 1) Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik / good governance, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi kependudukan;
 - c. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur;
 - d. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan;
 - e. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang *reliable* dan *up to date*;
 - f. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen kearsipan;
 - g. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
 - i. Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - j. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat.
 - 2) Mendorong terciptanya kehidupan yang religius, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan Peningkatan kehidupan beragama dan Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;

- c. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dan penambahan pos pemadam kebakaran.
- 3) Pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok manusia, dengan fokus pada:
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat;
 - b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Fasilitas Pembangunan Perumahan Swadaya.
- 2. Penegakkan dan Pelaksanaan Empat Pilar Pembangunan, yaitu:
 - 1) Pembangunan Kualitas Manusia, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan Sarpras, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Penguatan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Peningkatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan serta Penguatan Manajemen Penyelenggaraan Kesehatan;
 - c. Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan KB dan pengembangan pusat pelayanan KB;
 - d. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga;
 - e. Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Perpustakaan digital;
 - f. Fasilitas pementasan, pengiriman dan pelestarian seni budaya daerah;
 - g. Peningkatan Fasilitas serta Pengembangan Even Kepemudaan dan Kompetisi Olahraga.
 - 2) Pembangunan Perdesaan, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana permukiman;
 - b. Percepatan pembangunan serta pemeliharaan sarpras air bersih perkotaan dan perdesaan;
 - c. Peningkatan manajemen dan Sarana Prasarana pengelolaan sampah padat;
 - d. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat desa.
 - 3) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, dengan fokus pada:
 - a. Pengembangan Destinasi, Promosi dan Industri Pariwisata;
 - b. Introduksi teknologi dan Pengembangan Industri terutama yang berbahan baku local;
 - c. Meningkatkan Ketrampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
 - d. Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi;
 - e. Peningkatan Manajemen dan Jejaring Usaha bagi Usaha Mikro;

- f. Introduksi teknik dan teknologi budi daya pertanian yang unggul dan Pengembangan hortikultura / buah - buahan untuk substitusi impor;
 - g. Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ternak;
 - h. Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ikan.
- 4) Penyediaan Infrastruktur yang Memadai, dengan fokus pada:
- a. Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. Percepatan pembangunan serta pemeliharaan sarpras irigasi primer dan sekunder;
 - c. Peningkatan kualitas prasarana pemerintahan;
 - d. Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana permukiman;
 - e. Penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum;
- 5) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, dengan fokus pada:
- a. Pengurangan timbulan pencemaran lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan konservasi dan pemulihan kerusakan LH
 - c. Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - d. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau public;
 - e. Peningkatan fasilitasi pembangunan IPAL skala komunal;
 - f. Peningkatan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan sampah padat.
- 6) Dukungan Sektor Lain Secara Sinergis, dengan fokus pada:
- a. Optimalisasi implementasi peraturan perundangan tentang bangunan gedung;
 - b. Peningkatan pengelolaan tanah untuk kepentingan umum;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan *e-government* serta pengelolaan informasi dan komunikasi public;
 - d. Pelaksanaan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
 - e. Peningkatan promosi dan kepastian serta kemudahan perijinan;
 - f. Mengembangkan hubungan industrial yang harmonis;
 - g. Peningkatan fasilitasi, pembinaan serta pemberdayaan PMKS dan kelembagaan kesejahteraan sosial.

4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Manusia

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015– 2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh seluruh warga Negara, dengan sub agenda prioritas :
 - a. Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif;
 - b. Memperkuat Sistem Pertahanan Nasional;
 - c. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim;
 - d. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 - e. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran;
 - f. Memperkuat Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan Regional;
 - g. Meminimalisasi Dampak Globalisasi;
 - h. Membangun Industri Pertahanan Nasional;

- i. Membangun Polri yang Professional; dan
 - j. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan sub agenda prioritas :
 - a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
 - b. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;
 - c. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
 - d. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
 - e. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan, dengan sub agenda prioritas :
 - a. Peletakan Dasar–Dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris ;
 - b. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia; dan
 - c. Penanggulangan Kemiskinan.
 4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya , dengan sub agenda prioritas :
 - b. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan ;
 - c. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;
 - d. Pemberantasan Tindakan Penambangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar ;
 - e. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba ;
 - f. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah ;
 - g. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dengan sub agenda prioritas :
 - a. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
 - b. Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar ;
 - c. Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat ;

- d. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja; dan
 - e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan sub agenda prioritas:
- a. Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan ;
 - b. Membangun Transportasi Umum Masal Perkotaan ;
 - c. Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
 - d. Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur;
 - e. Penguatan Investasi ;
 - f. Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan ;
 - g. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi ;
 - h. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional ;
 - i. Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional ;
 - j. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja ; dan
 - k. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda prioritas :
- a. Peningkatan Kedaulatan Pangan ;
 - b. Ketahanan Air ;
 - c. Kedaulatan Energi ;
 - d. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana ;
 - e. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan ;
 - f. Penguatan Sektor Keuangan ;
 - g. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara ;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dengan sub agenda prioritas :
- a. Membangun pendidikan kewarganegaraan ;
 - b. Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional ;
 - c. Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil ;
 - d. Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi ;

- e. Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang IPTEK.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dengan sub agenda prioritas :
- a. Memperkuat pendidikan ke-Bhineka-an dan menciptakan ruang – ruang dialog antar warga ;
 - b. Restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga ;
 - c. Membangun kembali gotong – royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi social ;
 - d. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan ;
 - e. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- a. Kedaulatan pangan.

Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.

- b. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan.

Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.

- c. Kemaritiman dan kelautan.

Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

- d. Pariwisata dan industri.

Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- a. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- b. Wilayah pinggiran;
- c. Luar Jawa;
- d. Kawasan Timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Selain harus ada prakondisi yang mendukung terciptanya ketiga dimensi tersebut di atas, pembangunan juga harus berprinsip *quickwins*, dimana hasil pembangunan harus dapat segera dilihat hasilnya. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10 (sepuluh) prioritas dan program prioritas yaitu:

1. Pendidikan :

- a. Pendidikan Vokasi;

- b. Pendidikan kualitas guru.
- 2. Kesehatan:
 - a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - c. Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
- 3. Perumahan dan Permukiman:
 - a. Penyediaan perumahan layak;
 - b. Air bersih dan sanitasi;
- 4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata:
 - a. Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10);
 - b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10);
 - c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14);
 - d. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja;
 - e. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi;
- 5. Ketahanan Energi:
 - a. EBT dan konservasi energy;
 - b. Pemenuhan kebutuhan energy;
- 6. Ketahanan Pangan:
 - a. Peningkatan produksi pangan;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi);
- 7. Penanggulangan Kemiskinan:
 - a. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.
- 8. Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman:
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda);
 - b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika.
- 9. Pembangunan wilayah:
 - a. Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal;
 - b. Pembangunan perdesaan;
 - c. Reforma agrarian;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. Percepatan pembangunan Papua.
- 10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:
 - a. Penguatan pertahanan;

- b. Stabilitas politik dan keamanan;
- c. Kepastian hukum;
- d. Reformasi birokrasi.

Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purbalingga serta Sasaran dan Program Prioritas Daerah Tahun 2018 secara lebih jelas sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purbalingga serta Sasaran dan Program Prioritas Daerah Tahun 2018

Prioritas RKP	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas RKPD Kabupaten Purbalingga	Sasaran	Program Prioritas Daerah
<u>Tema:</u> “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”	<u>Tema:</u> “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”	<u>Tema:</u> “Memastikan Warga Purbalingga Tidak Ada yang Tertinggal, dalam Upaya Menggapai Sejahtera melalui Peningkatan Akses terhadap Pembangunan”		
Dimensi Pembangunan Manusia	Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar	Pembangunan Kualitas Manusia		
Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Program Wajar Dikdas 9 Tahun
				Program Pendidikan Non Formal
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
				Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan

Prioritas RKP	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas RKPD Kabupaten Purbalingga	Sasaran	Program Prioritas Daerah
				Tinggi.
				Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usila
				Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan
				Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Kesehatan Matra
				Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Prioritas RKP	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas RKPD Kabupaten Purbalingga	Sasaran	Program Prioritas Daerah
				Kesehatan
				Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Program Pengawasan Obat dan Makanan
				Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan
Perumahan dan Permukiman	Infrastruktur	Perumahan dan permukiman	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
			Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumber daya Air
Revolusi Mental	Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik / <i>good governance</i>	Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah	Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
				Program Penataan Administrasi

Prioritas RKP	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas RKPD Kabupaten Purbalingga	Sasaran	Program Prioritas Daerah
				Kependudukan
				Program Fasilitasi dan Pengembangan Kepegawaian Daerah
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Penelitian dan Pengembangan Iptek
				Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah
				Program Pengelolaan Kearsipan
				Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
				Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kesadaran politik rakyat dan kesadaran masyarakat dalam ber-	Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik

Prioritas RKP	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas RKPD Kabupaten Purbalingga	Sasaran	Program Prioritas Daerah
			masyarakat, berbangsa, dan bernegara	
			Meningkatnya ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
			Meningkatkan Intensitas Pembinaan & Pementasan Kesenian dan Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi
				Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
			Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masy. Desa	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa

Pelaksanaan prioritas pembangunan sebagaimana dalam tabel di atas juga dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan yang *pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment*. Dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga, maka dilakukan strategi pembangunan disertai pemerataan (*growth with equity*) yang bertumpu pada keserasaian pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dalam menciptakan kesempatan kerja (*pro-jobs*) dan mengurangi kemiskinan (*pro-poor*) yang tetap berdasarkan kelestarian alam (*pro-environment*). Melalui strategi yang *pro growth*, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengarahkan kebijakan ekonomi pada terwujudnya

pertumbuhan ekonomi Purbalingga yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat yang semakin berkualitas dan berkeadilan melalui pendayagunaan seluruh potensi daerah.

A. Strategi *pro growth*, dilakukan antara lain melalui :

1. Meningkatkan pendapatan per kapita riil masyarakat secara lebih merata dengan mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi;
2. Meningkatkan peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi dengan didukung investasi swasta yang ramah tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan.
3. Peningkatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produk.
4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank terutama lembaga keuangan masyarakat (LKM) guna semakin meningkatkan akses modal bagi usaha ekonomi rakyat.
5. Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen.
6. Penciptaan lingkungan bisnis (*business environment*) yang semakin kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sistem pelayanan perizinan, peningkatan penyediaan dan kualitas infrastruktur penunjang, kemudahan akses terhadap lahan usaha, serta kepastian usaha.
7. Melakukan upaya penertiban usaha dan sosialisasi tentang perlindungan konsumen, menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya, serta meningkatkan perlindungan konsumen.

8. Peningkatan peran usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional dan fasilitasi pedagang kecil, serta pengaturan pasar modern.
 9. Penguatan industri kecil menengah dan industri padat karya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk semakin memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.
 10. Peningkatan kapasitas, kualitas, dan promosi obyek-obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan sehingga akan semakin meningkatkan perannya sebagai *prime mover* perekonomian daerah.
- B. Strategi *Pro Poor*, dilakukan dengan mengimplementasikan 4 (empat) strategi intervensi program yakni :
1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
 2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
 3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
 4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- C. Strategi *Pro Job*
- Strategi *Pro Job* antara lain dilakukan melalui perluasan dan peningkatan akses tenaga kerja atas kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan kualitas SDM, peningkatan keterampilan, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial. Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, maka upaya pembangunan ekonomi di samping harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga harus ramah tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang ramah tenaga kerja berarti

akan semakin membuka dan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Bertambah kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan sendirinya akan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kesempatan memperoleh pendapatan, maka akan meningkatkan kemampuan daya beli yang berarti juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Sedang dengan meningkatnya konsumsi masyarakat secara berantai akan mendorong aktivitas produksi, yang berarti akan meningkatkan kesempatan memperoleh pendapatan karena aktivitas produksi secara otomatis akan membutuhkan berbagai faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja dan sebagainya.

Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, peluang berusaha, meningkatkan produktifitas usaha, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan berusaha, peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial.

D. Strategi *Pro Environment*

Eksplorasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya. Sementara itu pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan terus menurunnya luasan lahan pertanian menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi sawah dan lahan pertanian produktif lainnya serta rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian.

Di sisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan

lainnya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumber daya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global.

Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas maka perlu mengimplementasikan strategi pembangunan yang *pro environment* yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Strategi pembangunan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, memulihkan kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat, dan memelihara kekayaan keragaman sumberdaya hayati dan kekhasan sumber daya alam.

Strategi ini dilakukan melalui perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan Peningkatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat, serta penegakan hukum.

4.5. Strategi dan Arah Kebijakan Sektor Pembangunan Unggulan Daerah

Strategi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu : Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, dan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Sedangkan yang menjadi prioritas pada Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan adalah: Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri.

Hal ini juga sangat selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, salah satu misi dari 6 (enam) misinya adalah Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Melihat pada kondisi agro ekologis Kabupaten Purbalingga yang memberikan peluang untuk pengembangan pariwisata khususnya desa wisata yang dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat karena memiliki efek multiplier yang luas terhadap sektor lainnya seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, sektor UMK, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata.

Arah kebijakan pembangunan pariwisata hendaknya sesuai Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RPIP). Kabupaten Purbalingga sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Pariwisata yang diantaranya mengamanatkan untuk menyusun dokumen RPIP dengan penjelasan bahwa pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Purbalingga diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga mampu berdaya saing dengan daerah lain.

Hal ini juga mempertegas kembali pada Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yaitu : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari misi ini adalah : Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang salah satu Sasarannya adalah Meningkatnya daya saing pariwisata

Strategi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam dimensi pembangunan sektor unggulan prioritas pariwisata adalah :

1. Mengembangkan destinasi wisata dan ekonomi kreatif, dengan arah kebijakan berupa pengembangan pariwisata berbasis potensi sumber daya lokal;
2. Dengan pengembangan potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik yang merupakan modal untuk pengembangan serta daya tarik kunjungan wisata dan pada akhirnya menjadikan daya saing wisata;

3. Fasilitasi pembangunan destinasi yang menjadi fokus wisata alam melalui desa-desa wisata yang telah ada dan wisata buatan seperti Owabong, Purbasari, Taman Reptil, dsb;
4. Meningkatkan citra kepariwisataan dengan promosi dan melaksanakan even-even skala besar di lokasi wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga;
5. Tata kelola destinasi dengan keterlibatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) serta pemberdayaan masyarakat di desa-desa wisata;
6. Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar obyek daya tarik wisata dengan arah kebijakan optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata termasuk diantaranya desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga.

4.6. Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan

Dalam RPJMN Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah dengan sasaran pokok terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Purbalingga yang diantaranya ditandai dengan terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk mewujudkan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah antara lain melalui penyediaan infrastruktur serta berbagai prasarana dan sarana sosial ekonomi untuk mendorong aksesibilitas dan perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi di seluruh wilayah sehingga tidak muncul disparitas kesejahteraan dan kemajuan antar wilayah terutama antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

Masalah ketimpangan masih menjadi tantangan besar Kabupaten Purbalingga ke depan. Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah. Konektivitas antar wilayah menjadi penting mengingat masih terdapat sekitar 19,70 % penduduk Purbalingga yang berada di bawah kemiskinan, menempati peringkat ke-4 di Provinsi Jateng (BPS). Ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya wilayah bagian Utara Kabupaten Purbalingga dan daerah yang berbatasan dengan kabupaten tetangga masih menjadi tantangan tersendiri.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah,

sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal. Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Beberapa hasil studi menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran di antaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada publikasi *World Development Report (World Bank, 1994)*, infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Studi dari World Bank (1994) juga melaporkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Pembangunan Infrastruktur diharapkan akan mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki *multiplier effect* kepada pembangunan di seluruh wilayah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata.

Berdasarkan hasil kajian yang dituangkan dalam materi teknis Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031, wilayah Kabupaten Purbalingga dibagi dalam beberapa pusat kegiatan yang menjadi simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat. Pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga tersebut yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat-pusat kegiatan wilayah yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi, dalam RTRW disebut struktur ruang wilayah. Adapun rincian dan sebaran lokasi struktur ruang wilayah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.3
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga

No	Struktur Kota	Keterangan	Kawasan Perkotaan
1	PKWp Pusat Kegiatan Wilayah Promosi	Pusat kegiatan lokal yang di promosikan atau direkomenda-sikan akan menjadi PKW, mengingat secara fungsi dan perannya memiliki karakteris-tik pusat kegiatan wilayah dan berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.	Kawasan Perkotaan Purbalingga
2	PKL Pusat Kegiatan Lokal	Kawasan yang dikembangkan dengan memiliki skala pelayan-an untuk kegiatan tingkat regional Kabupaten Purbaling-ga dan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan.	Kawasan Perkotaan Bobotsari Kawasan Perkotaan Bukateja Kawasan Perkotaan Rembang
3	PKLp Pusat Kegiatan Lokal Promosi	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang diprediksi dan dipromosikan tumbuh sebagai PKL baru dengan skala pelaya-nan untuk beberapa wilayah kecamatan.	Kawasan Perkotaan Karangreja,
4	PPK Pusat Pelayanan Kawasan	Kawasan perkotaan yang ber-fungsi untuk melayani kegiat-an skala kecamatan atau beberapa desa.	Kawasan IKK Kalimanah, Kawasan IKK Kaligondang, Kawasan IKK Kertanegara, Kawasan IKK Bojongsari, Kawasan IKK Karanganyar, Kawasan IKK Karangmoncol, Kawasan IKK Kemangkon, Kawasan IKK Kejobong, Kawasan IKK Kutasari, Kawasan IKK Padamara, Kawasan IKK Mrebet, Kawasan IKK Pengadegan, Kawasan IKK Karangjambu,
5	PPL Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat permukiman yang ber-fungsi untuk melayani kegiat-an skala antar desa.	PPL Kutawis di Kecamatan Bukateja PPL Makam di Kecamatan Rembang PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja PPL Purbayasa Kecamatan Padamara PPL Picung, Desa Krangean Kecamatan Kertanegara PPL Tunjungmulu Kecamatan Karangmoncol PPL Bedagas Kecamatan Pengadegan

No	Struktur Kota	Keterangan	Kawasan Perkotaan
			PPL Bandingan Kecamatan Kejobong

Sumber: Materi Teknis Review RTRW Kabupaten Purbalingga

Hirarki pertama dalam rencana struktur kawasan perkotaan Kabupaten Purbalingga adalah PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) yaitu wilayah yang tergolong hirarki pertama dan memiliki skala pelayanan tingkat regional Kabupaten Purbalingga. Yang termasuk PKWp adalah Ibukota Kabupaten Purbalingga. Hirarki kedua dalam rencana struktur kawasan perkotaan Kabupaten Purbalingga adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan. Yang termasuk PKL adalah Kawasan Perkotaan Bobotsari, Kawasan Perkotaan Bukateja, dan Kawasan Perkotaan Rembang. Hirarki ketiga dalam rencana struktur kawasan perkotaan Kabupaten Purbalingga adalah Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang ke depan dipromosikan berkembang menjadi PKL. PKLp diprediksi akan tumbuh sebagai PKL yang mampu melayani skala regional Kabupaten Purbalingga adalah Kota Karangreja. Hirarki keempat dalam rencana struktur kawasan perkotaan Kabupaten Purbalingga adalah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Hirarki kelima dalam rencana struktur kawasan perkotaan Kabupaten Purbalingga adalah Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa. Adapun rincian PPL meliputi: PPL Kutawis di Kecamatan Bukateja; PPL Makam di Kecamatan Rembang; PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja dan PPL Purbayasa Kecamatan Padamara.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih terus melakukan berbagai upaya antara lain:

- Meningkatkan konektifitas antar wilayah melalui peningkatan jalan dengan melakukan pelebaran jalan;
- Membangun akses ke wilayah-wilayah strategis;
- Membangun wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga;
- Membuka akses penghubung antar wilayah kecamatan yang berbatasan tetapi belum memiliki akses penghubung;
- Membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terpencil.

Sampai dengan saat ini terus dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya dari wilayah utara Kabupaten Purbalingga dan daerah pinggiran atau wilayah perbatasan dengan kabupaten tetangga, guna pemerataan ekonomi dan juga menurunkan ketimpangan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di wilayah utara Kabupaten Purbalingga khususnya peningkatan aksesibilitas antar wilayah yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal seperti Kecamatan Rembang, Kecamatan Bobotsari, serta wilayah Kecamatan Karangreja masih menjadi prioritas pembangunan. Percepatan pembangunan infrastruktur yang secara masif dilakukan diharapkan dapat memacu bergeraknya ekonomi, sehingga ekonomi tidak hanya tumbuh tinggi namun juga tumbuh secara merata dan berkeadilan. Disamping itu, pembangunan di wilayah strategis khususnya di wilayah Kecamatan Bukateja dalam rangka mendukung rencana pengembangan Lanud Jenderal Besar Soedirman menjadi Bandara Komersil juga masih terus dilaksanakan.

Disamping infrastruktur wilayah, yang juga menjadi strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan di Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Pembangunan di wilayah desa, guna mengurangi jumlah penduduk miskin yang sebagian besar tinggal di desa. Hal ini mendasari pada filosofi pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa yang menyesuaikan dengan kondisi geografis di desa, melalui strategi meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman utamanya rumah layak huni dan sarana sanitasi;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa melalui strategi fasilitasi pengelolaan BUMdes serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi pertanian, fasilitasi pembinaan maupun pendampingan dalam pengembangan usaha khususnya Usaha Mikro Kecil (UKM) baik berupa pelatihan, bantuan permodalan/kredit, pemasaran, kemasan produk, kewirausahaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
4. Pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan.

4.7. Strategi dan Arah Kebijakan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015 - 2019, tantangan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan wibawa negara mencakup : (1). Peningkatan stabilitas dan keamanan negara; (2). Pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta (3). Pemberantasan korupsi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, diharapkan tercipta Kualitas tata kelola pemerintahan yang secara signifikan memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Adapun program prioritas dalam prioritas tata kelola dan reformasi birokrasi antara lain sebagai berikut: (1) pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi 2015-2019 (2) penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan dan (3) peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur, dan keuangan pemerintah daerah. Sasaran pengembangan tata kelola pemerintahan daerah pada RPJMN tahun 2015-2019, meliputi:

- a. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah ;
- b. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah ; dan
- c. Meningkatnya Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah

Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran pengembangan tata kelola pemerintahan daerah pada RPJMN tahun 2015-2019 meliputi :

- a. Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah :
 - Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
 - Meningkatkan kualitas penataan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi;

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah serta kapasitas pemerintah daerah dalam kerjasama daerah;
 - Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah.
 - Perbaiki pelayanan publik melalui implementasi SPM, PTSP, dan mendorong inovasi daerah;
 - Meningkatkan akuntabilitas dan tata pemerintahan; dan
 - Meningkatkan kapasitas DPRD dan manajemen pemilihan kepala daerah.
- b. Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah adalah:
- Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur
 - Mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.
- c. Strategi Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah adalah:
- Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah;
 - Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Strategi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 menggariskan kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas melalui :

- a. Kepastian dan penegakan hukum;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Politik dan demokrasi; dan
- d. Tata kelola dan reformasi birokrasi.

Sedangkan yang menjadi prioritas dalam mewujudkan kondisi yang diperlukan tersebut adalah dengan :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Sesuai dokumen RPJM Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018, dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai - nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno, diwujudkan dengan arah kebijakan Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai - nilai dasar Trisakti Bung Karno. Adapun strategi yang dilakukan adalah Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi politik, konsultasi, koordinasi, komunikasi, demokratisasi, pemanfaatan potensi lokal, kerjasama dan kemitraan, serta memelihara nilai – nilai kearifan kebudayaan.

Sejalan dengan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan :

- (1) terwujudnya aparatur negara yang profesional, bersih dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,
- (2) terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal,
- (3) terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan penyelenggaraan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan (4). meningkatnya efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumberdaya pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Refomasi Birokrasi merupakan sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma data tata kelola pemerintahan, yang mengarah pada organisasi (kelembagaan), tatalaksana, SDM, pelayanan, akuntabilitas dan perundang undangan serta pola pikir. Perubahan memang harus selalu terjadi, karena dinamika suatu perjalanan kehidupan harus berbeda dari satu masa ke masa

berikutnya. Perkembangan global, sains dan teknologi, turut memengaruhi perubahan dan perubahan yang diharapkan di sini bukan sekadar berubah, tetapi harus terencana. Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang menjiwai implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Saat ini, diharapkan reformasi birokrasi telah dapat mencapai penguatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, peningkatan layanan dan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi, pada tahun 2019, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yang meliputi Organisasi, Tatalaksana, Peraturan

Perundang-undangan Sumber daya manusia, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan pola pikir.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan misi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima dilakukan melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Strategi yang dilaksanakan adalah dengan mengimplementasikan 5 Agenda Perubahan, yaitu: Agenda Struktural, Managerial, Intelektual, Behavioral dan Agenda Sosial yang dilaksanakan dengan spirit Kerja Cerdas, Kerja Keras dan Kerja Ikhlas.

Guna mewujudkan sasaran dan strategi tersebut, arah kebijakan yang dilakukan antara lain :

- 1) Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur;
- 3) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan;
- 4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- 6) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 7) Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat;
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi kependudukan;
- 9) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian;
- 10) Menyediakan data dan informasi pembangunan yang *reliable* dan *up to date*;
- 11) Meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen kearsipan.

Langkah nyata yang terus dan akan dilakukan antara lain melalui :

- 1) Komitmen dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui implementasi RAD PPK;
- 2) Penetapan dan penyempurnaan struktur OPD baru sebanyak 27 OPD, dilanjutkan dengan penataan pejabat struktural secara profesional;
- 3) Mempertahankan pengelolaan kinerja keuangan daerah dengan profesional guna mempertahankan opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian;
- 4) Melakukan upaya pendisiplinan ASN, antara lain dengan cara menghadiri apel pagi keliling ke seluruh OPD, kecamatan, dan desa / kelurahan,

pemberian kompensasi berbasis kinerja, serta pelaksanaan penilaian pegawai secara profesional;

- 5) Pembangunan prasarana Pemerintahan Daerah (kantor OPD dan DPRD);
- 6) Pengembangan Inovasi Daerah tiap OPD;
- 7) Menjadikan Pemkab Purbalingga sebagai organisasi pembelajaran (*leraning organization*) dengan mengembangkan pola berpikir sistem (*system thinking*), membangun tim pembaharuan (*tim learning*), dan mengembangkan dialog (*share vision*);
- 8) Pengembangan TKPKD;
- 9) Pengembangan Keterbukaan Informasi Purblik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- 10) Terus melakukan penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan capaian IKM;
- 11) Pengembangan dan peningkatan layanan PATEN;
- 12) Pengembangan sistem perijinan on line untuk mendukung layanan perijinan dan kemudahan investasi;
- 13) Mengembangkan pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
- 14) Penerapan *e – government* dalam sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, pelayanan publik, dan layanan pengadaan barang dan jasa.

4.8. Strategi dan Arah Kebijakan yang Berorientasi pada Bencana Alam, Perubahan Iklim dan Berwawasan Lingkungan

Dalam kaitan dengan perubahan iklim, sebagaimana yang menjadi agenda nasional dalam RPJMN 2015-2019 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak diwajibkan menentukan target penurunan emisi gas rumah kaca secara kuantitatif. Namun, Indonesia secara sukarela telah memberikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK) melalui Perpres No. 61/2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) yang ditetapkan melalui peraturan Gubernur. Di Provinsi Jawa Tengah RAD GRK telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2017.

Rencana pelaksanaan rencana mitigasi dan rencana adaptasi perubahan iklim pada berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di

daerah. Sebagaimana di Kabupaten Purbalingga telah menyusun dokumen *Low Emission Development* (LED) / Pembangunan rendah emisi di tahun 2016. Arah kebijakannya adalah pengarusutamaan pembangunan rendah emisi ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Sedangkan yang menjadi strategi untuk pencapaiannya adalah:

1. Menghitung kembali/inventarisir baseline emisi Kabupaten Purbalingga dari sektor energi, sampah, dan pertanian dalam arti luas termasuk kehutanan dan penggunaan lahan;
2. Menyusun skenario penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui aksi-aksi mitigasi;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan aksi mitigasi pembangunan rendah emisi.

4.9. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan - *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 – MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deflation* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sustainable Development Goals (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO). Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan

indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal dan dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Adapun 17 *global goals* dari SDGs adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan
Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan
Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas
Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesenjangan Gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi
Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau
Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Kabupaten Purbalingga telah memiliki prioritas pembangunan, sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021, yang masing-masing prioritas terdapat konvergensi dan divergensi antara SDGs dan RPJMD. Dalam hal pembangunan manusia, perlindungan masyarakat dan upaya penurunan ketimpangan, kedua dokumen selaras berjalan. Dalam hal pembangunan ekonomi, keduanya juga teman seiring. Namun, dalam hal keberlanjutan, ekologi dan konservasi lingkungan hidup, maka RKPD harus melakukan banyak penyesuaian (konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, peningkatan turus jalan, manajemen air, dan

sebagainya). Meski begitu, secara keseluruhan bahwa terdapat beberapa fokus SDGs yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan 4 agenda prioritas Pemerintah Daerah. Hanya 1 tujuan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten Purbalingga yakni tujuan ke 14, Kehidupan Bawah Laut karena Kabupaten Purbalingga tidak memiliki laut. Adapun konvergensi prioritas daerah terhadap tujuan SDGs dapat dijelaskan dalam table berikut ini.

Tabel 4.4
Peta Konvergensi Prioritas Daerah terhadap
Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

No	Konvergensi Tujuan SDG's	Prioritas Daerah
A		Penciptaan Landasan yang Kokoh untuk Pelaksanaan Pembangunan
1	Tujuan 16 dan 17	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan utamanya adalah agar pemerintah daerah mampu mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Kebijakan dan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain dilakukan melalui: (1) meningkatkan kompetensi dan intelektualitas aparatur; (2) penyusunan struktur organisasi dan kelembagaan yang sesuai dengan fungsi dan beban kerja; (3) perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan pemerintahan; dan (4) meningkatkan integritas dan sikap positif utamanya bagi aparatur pemerintah daerah.
2	Tujuan 11	Mendorong terciptanya kehidupan yang religius, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Tujannya utamanya adalah mewujudkan tatanan kehidupan dan lingkungan sosial kemasyarakatan yang religius, aman, tentram dan harmonis.
3	Tujuan 1, 2, 10, 12	Pemenuhan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia. Tujannya utamanya adalah untuk menjamin kecukupan kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan bagi seluruh masyarakat, utamanya bagi keluarga miskin.
B		Pengutamaan Pelaksanaan Empat Pilar Pembangunan
1	Tujuan 3, 4	Pembangunan Kualitas Manusia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Purbalingga. Kualitas hidup manusia menyangkut dimensi fisik dan mental spiritual, sehingga selain harus sehat dan cerdas, juga harus memiliki mental serta karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia utamanya dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2	Tujuan 10	Pembangunan Perdesaan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan wilayah perdesaan yang terdiri atas 224 desa dan 15 kelurahan. Oleh

No	Konvergensi Tujuan SDG's	Prioritas Daerah
		karena itu, tingkat keberhasilan pembangunan di Purbalingga dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perdesaan. Saat ini masih dirasa adanya disparitas antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Tujuan pembangunan perdesaan adalah mendorong agar wilayah perdesaan menjadi tempat yang nyaman, menarik dan produktif untuk permukiman tempat tinggal serta tempat bekerja dan melaksanakan kegiatan usaha.
3	Tujuan 8, 9	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan antara lain adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat diharapkan dapat mendorong daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup serta peningkatan kapasitas dan kualitas hidup manusia.
4	Tujuan 6,7,11	Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana wilayah yang memadai dan terintegrasi sebagai penunjang perwujudan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang aktifitas masyarakat secara merata.
C		Pengarusutamaan Pembangunan Berkelan-jutan
1	Tujuan 13 dan 15	Dalam pelaksanaan pembangunan, haruslah didasarkan pada filosofi yang sangat penting dan harus melandasi setiap pelaksanaan pembangunan yaitu filosofi pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan diupayakan seminimal mungkin mengganggu fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.
D		Dukungan Sektor Lainnya secara Sinergis
1	Tujuan 5	Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan yang multi kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan yang oleh karena itu tidak dapat diatasi melalui pembangunan satu bidang atau sektor, melainkan harus didukung oleh berbagai bidang, program, dan kegiatan pembangunan secara simultan dan bersinergi